

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Maimunah (2006). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat.

Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat daerah maupun kepada pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia, Fakhrina (2009).

Upaya meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada di daerah tersebut dengan melakukan proses pembangunan. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, Situngkir (2009). Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi, Sularso (2011).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam

masyarakat meningkat. Menurut Maryati, (2010) meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) daerah setiap tahunnya. Apabila suatu daerah berhasil menggali potensi yang ada, maka diharapkan terjadi peningkatan pelayanan di berbagai sektor. Peningkatan dalam pelayanan ini diharapkan akan dapat menarik para investor untuk membuka usahanya di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan terlihat jika terjadi perkembangan perekonomian yang baik dari periode ke periode berikutnya di daerah tersebut.

Menurut Situngkir (2009) aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja pembangunan (modal) dalam APBD. Bati (2009) mengatakan, dengan adanya belanja modal yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Darwanto dkk (2007) mengatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktifitas pembangunan. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Sularso (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh belanja pembangunan daerah. Dengan bertambahnya belanja modal maka produktifitas masyarakat akan

meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah, Abimanyu (2005) dalam Harianto (2007). Hal ini sejalan dengan penelitian Adi yang menunjukkan bahwa belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah maupun pertumbuhan ekonomi.

Di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Menurut Rosjidi (2001;87) dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai keseluruhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat, daerah dan antar daerah, Sidik et al (2002). Dana alokasi umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya. Tujuan alokasi dana alokasi dana alokasi umum adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia, Kuncoro (2004) dalam Situngkir (2009).

Di samping dana perimbangan tersebut pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang syah. Brata (2004) dalam Harianto (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan bagian sumbangan dan bantuan. Pendapatan asli daerah secara berkelanjutan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, Bati (2009). Menurut Saragih (2003;55), pendapatan asli daerah merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Penerimaan yang menjadi andalan PAD adalah pajak daerah dan retribusi. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Adi (2006).

Pembangunan fasilitas sektor publik akan berujung pada pendapatan daerah. Harianto (2007) mengatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. Pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan per kapita, tetapi pertumbuhan yang terjadi masih kurang merata sehingga banyak ketimpangan/jarak ekonomi antar daerah.

Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun pendapatan asli daerah itu sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita. Harianto (2007) mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, memberikan indikasi semakin tingginya tingkat pembangunan suatu daerah. Kesimpulan ini memperjelas bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka pendapatan per kapita juga akan mengikutinya.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita dengan tujuan untuk menunjukkan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat ada atau tidaknya hubungan antara kelima variabel yang akan diteliti tersebut sehingga pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengetahui dan bekerja sama dalam menyeimbangkan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja pembangunan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Tujuan lain dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita yang berbeda-beda di setiap Kabupaten di Jawa Timur. Peneliti ingin memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti merasa termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan

Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hubungan dana alokasi umum dengan belanja pembangunan?
2. Bagaimana hubungan belanja pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi daerah?
3. Bagaimana hubungan belanja pembangunan dengan pendapatan asli daerah?
4. Bagaimana hubungan belanja pembangunan dengan pendapatan per kapita?
5. Bagaimana hubungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan per kapita?
6. Bagaimana hubungan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan per kapita ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dana alokasi umum dengan belanja pembangunan.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan belanja pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan belanja pembangunan dengan pendapatan asli daerah.

4. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan belanja pembangunan dengan pendapatan per kapita.
5. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan per kapita.
6. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan per kapita.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi dunia pendidikan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang bidang ini.

2. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah referensi dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian mengenai akuntansi sektor publik selanjutnya.

3. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan sekaligus menerapkan secara langsung ilmu pendidikan yang sudah diperoleh selama mengikuti program studi akuntansi di Universitas Muhammadiyah Gresik.

1.5 Kontribusi Penelitian

Adi (2006) melakukan penelitian tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan

pendapatan per kapita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah maupun pertumbuhan ekonomi. Harianto (2007) melakukan penelitian mengenai hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa dana alokasi umum sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Belanja modal mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendapatan per kapita dalam hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan per kapita dan dana alokasi umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui belanja modal.

Penelitian ini menggabungkan antara penelitian Adi (2006) dan Harianto (2007) yaitu menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita.